

GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
U	MEDIA INDONESIA	1	20-08-2002

Rakyat Miskin tidak Banyak Menikmati Subsidi BBM

JAKARTA (Media): Subsidi bahan bakar minyak (BBM) dalam RAPBN 2003 sudah saatnya diperkecil untuk kemudian dicabut sama sekali pada RAPBN 2004. Subsidi BBM hanya dinikmati segelintir masyarakat berpenghasilan menengah ke atas dan tidak banyak dinikmati rakyat kecil. Konsumsi BBM dan listrik masyarakat miskin hanya 0,2%.

Demikian ekonom dari UI Chatib Basri dalam jumpa pers Perhimpunan Indonesia Baru, kemarin, di Jakarta. "Jika subsidi BBM dicabut, efeknya justru sangat dinikmati oleh masyarakat kecil," ujar Chatib.

Berdasarkan hasil survei terhadap masyarakat berpenghasilan kurang dari Rp30.000 per bulan atau Rp1.000 per hari, menurut dia, selama ini mereka mengonsumsi listrik dan BBM hanya 0,2%. Sumber energi yang diperoleh mereka sebanyak 66% berasal dari kayu bakar, tambah Chatib.

Sedangkan konsumsi per bulan BBM dan listrik masyarakat berpenghasilan sekitar Rp100.000 sebanyak 8-9%. Karena itu, kata Chatib, kebanyakan BBM hanya dinikmati golongan berpenghasilan menengah ke atas.

Menurutnya, penghapusan subsidi BBM tidak hanya memenuhi kebutuhan anggaran. Tapi, juga mencerminkan keadilan. Dia menolak anggapan penghapusan subsidi BBM akan mendorong inflasi. Menurut dia, kenaikan harga justru lebih dipengaruhi perubahan kurs rupiah terhadap dolar AS.

Saat terjadi kenaikan BBM Januari lalu, jelas dia, justru inflasi menunjukkan lebih rendah. Yakni, pada Januari 1,9% dan Februari 1,4%.

Menurut Chatib, dengan menyubsidi BBM terus-menerus maka akan memberi *track* yang tidak benar. "Setidaknya, pencabutan subsidi BBM pada RAPBN 2004 akan menghasilkan rasionalisasi pemulihan ekonomi."

Keputusan menghapus subsidi BBM tersebut tertuang dalam

nota keuangan dan RAPBN 2003 yang dibaca Presiden Megawati Soekarnoputri di hadapan anggota DPR pada Jumat (16/8). Kebijakan ini bisa menghemat anggaran Rp10 triliun. Pada APBN 2002 jumlah subsidi BBM mencapai Rp30,5 triliun. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro menegaskan mulai 2003 pemerintah melepas harga minyak solar, minyak diesel, dan minyak bakar 100% sesuai harga pasar, sementara harga minyak tanah tetap Rp600 per liter.

Tidak populis

Anggota Panitia Anggaran DPR Priyo Budisantoso menilai kebijakan tersebut tidak populis karena akan membebani masyarakat. "Apalagi, tidak ada jaminan dengan pencabutan subsidi itu maka inflasi bisa ditekan. Belum lagi dampak terhadap kenaikan biaya produksi. Apa ini yang dinamakan kemajuan ekonomi?" katanya di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, ini kebijakan yang ironis. Pasalnya, Indonesia dikenal sebagai negara penghasil minyak dan gas bumi yang mampu memberikan devisa dalam beberapa dekade terakhir hingga Rp100 triliun.

Pencabutan subsidi BBM itu, kata Priyo, akan menyengsarakan rakyat karena harga kebutuhan pangan pasti melambung. Dia perkirakan inflasi tidak akan terbendung meski pada RAPBN 2003 telah dipatok 8%.

Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia Benny Soetrisno mengingatkan dampak sosial politis dari kenaikan harga kebutuhan pangan akibat pencabutan subsidi BBM. Sektor industri dikawatirkan mendapat tekanan dari pekerja agar menaikkan upah menyusul meningkatnya biaya hidup.

"Padahal, industri itu sedang berjuang untuk tetap bertahan di tengah kondisi yang belum stabil. Jika ditambah beban akibat pencabutan subsidi, saya khawatir akan banyak investor yang lari," katanya. (Uut/X-8)